

## ABSTRACT

Cindy Cintasih (04320070053)

### **THE NEGOTIATION BETWEEN REPUBLIC INDONESIA AND MALAYSIA CONCERNING PROTECTION OF INDONESIAN LABOR MIGRANTS 2006-2010**

(xvii + 122 pages, 8 figures, 6 tables, 10 appendices)

**Key words: negotiation, national interest, and Indonesian labor migrants.**

For years, Malaysia has become the main destination for Indonesian labor migrants. However, the lack of protection from Indonesia and Malaysia leads to several cases of human rights violation experienced by Indonesian labor migrants. The negotiation between Indonesia and Malaysia was held as the means to establish a better protection system for Indonesian labor migrants.

The goal of this research is to obtain a comprehensive description about the process of the negotiation between the government of Indonesia and Malaysia concerning Indonesian labor migrants. The analysis on the dynamics movement of negotiation from year to year is expected to provide the root of the long phases negotiation. Moreover, the analysis on the preliminary outcome of each negotiation is also provided to see the factors behind every decision.

This research uses descriptive analysis method with qualitative approach. Concepts used are: negotiation in realism perspective (including the component within the negotiation such as: bargaining, escalation, de-escalation, and deadlocks) and national interests on Indonesian Labor migrants (as the reasons of the negotiation).

The result of this research shows that the negotiation between Indonesia and Malaysia lies within three different meetings: annual consultation, ministry level meeting and Joint Working Group. These three meetings have significant contribution to the improvement of negotiation as they have different roles in completing the framework of policy making within a series of negotiations. The long phases of the negotiation occur as a result of national interest frictions in Indonesian labor migrants between the states. Moreover, the lack of coordination of Indonesian migration staff leads to a weak negotiation position for Indonesia and makes the negotiation run ineffectively due to the gap between Indonesia and Malaysia.

References: 10 books (1982-2005), 4 e-journals (2004-2008); 11 research reports; 15 government publications; 15 websites; 39 newspaper articles, 3 Indonesian public laws.

## **ABSTRAK**

Cindy Cintasih (04320070053)

### **NEGOSIASI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA MENGENAI TENAGA KERJA INDONESIA 2006-2010**

(xvii + 122 halaman, 8 gambar, 6 tabel, 10 appendix)

Kata Kunci: Negosiasi, Kepentingan Nasional, dan Tenaga Kerja Indonesia.

Selama bertahun-tahun, Malaysia telah menjadi negara tujuan utama bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Akan tetapi, kurangnya perlindungan dari Indonesia dan Malaysia membawa sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh para TKI. Negosiasi antara Indonesia dan Malaysia diadakan sebagai sarana untuk menyusun sistem perlindungan yang lebih baik bagi para TKI.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi yang komprehensif mengenai proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia berkenaan dengan kasus TKI. Analisa tentang dinamika pergerakan negosiasi dari tahun ke tahun diharapkan dapat menyajikan akar permasalahan dari alotnya negosiasi ini. Selain itu, analisa pada hasil sementara dari setiap negosiasi juga tersedia untuk melihat faktor dibalik setiap keputusan.

Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Konsep-konsep yang digunakan antara lain: negosiasi dalam perspektif realist (termasuk komponen-komponen dalam negosiasi, seperti: tawar-menawar, eskalasi, de-eskalasi, dan kebuntuan) dan kepentingan nasional terhadap TKI (sebagai alasan dari negosiasi).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negosiasi antara Indonesia dan Malaysia terletak di dalam tiga pertemuan yang berbeda. Ketiga pertemuan ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan negosiasi, dimana ketiganya memiliki peran yang berbeda dalam melengkapi proses pembuatan kerangka kebijakan di dalam rangkaian negosiasi. Tahap panjang dari negosiasi terjadi sebagai akibat dari pergesekan kepentingan nasional antar negara pada TKI. Selain itu, kurangnya koordinasi oleh petugas migrasi Indonesia membawa Indonesia pada posisi yang lemah dalam negosiasi; membuat negosiasi tidak berjalan efektif karena adanya jurang posisi antara Indonesia dan Malaysia.

Referensi: 10 buku (1982-2005); 4 e-journals (2004-2008); 11 laporan penelitian; 15 publikasi pemerintah; 15 website; 39 artikel koran; 3 Hukum Publik Indonesia